

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET DAN INOVASI
: NASIONAL
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU
SUB UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWANTONO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN
3. NHK : 633483

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/264 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, LAINNYA Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, LAINNYA Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 615.000.000

1. MOBIL, FORD ECOSPORT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.500.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 66.408.830



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.925.908.830
III. HUTANG	Rp.	358.793.969
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.567.114.861

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.